

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keagenan dimana teori menjelaskan mengenai hubungan antara pihak pemegang saham (principal) dengan pihak manajemen (agen). Jensen & Meckling (1976) mengungkapkan bahwa, “Hubungan yang terjadi antara pihak manajer dan pemilik berada dalam kerangka hubungan keagenan.” Dalam hal tersebut pihak prinsipal sebagai pemilik akan menyerahkan informasi kepada pihak agen sebagai manajer agar dapat mengolah informasi. Hasil dari pengolahan data atau informasi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pihak prinsipal. Jensen & Meckling (1976) juga menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal akan menyebabkan konflik keagenan dalam perusahaan. Pihak agen diharapkan oleh pihak prinsipal untuk dapat melakukan tugas yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan pemegang saham, seperti memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Sedangkan, biasanya pihak agen bertindak atas dasar kepentingan yang dia miliki, yaitu memaksimalkan kesejahteraan agen. Konflik yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen akan menyebabkan asimetri informasi (*information asymmetry*).

Menurut Desmiyawati (2012), asimetri informasi adalah merupakan sebuah kondisi dimana saat manajer memiliki informasi yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan pihak eksternal dan pihak eksternal memiliki informasi yang terbatas mengenai prospek perusahaan. Akibatnya, akan meningkatkan tingkat resiko kecurangan yang disebabkan pihak agen memiliki informasi yang lebih banyak tentang kondisi perusahaan dan pihak agen dapat menyembunyikan informasi dalam pengambilan keputusan pada perusahaan tersebut. Salah satu elemen dari teori keagenan adalah asimetris informasi, yaitu dalam hal ini pihak agen lebih banyak mengetahui informasi terkait internal perusahaan secara lebih detail apabila dibandingkan dengan pihak pemegang saham yang hanya mendapati informasi perusahaan secara eksternal melalui hasil kinerja yang dibuat oleh manajemen. Oleh karena itu, hal ini memerlukan pengendalian internal dan *Good*

Corporate Governance untuk mengurangi adanya asimetris informasi antara seluruh pihak, sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang sesuai aturan dan transparan pada pihak prinsipal.

Maka dari itu, teori ini memiliki hubungan antara *Good Corporate Governance* dan Pengendalian Internal yang merupakan sebuah kontrol untuk dapat mencegah terjadinya asimetris informasi yang nantinya memiliki peluang bagi seseorang maupun sekelompok untuk dapat melakukan tindakan *fraud*.

2.1.2. Fraud

2.1.2.1 Pengertian Fraud

Menurut Sawyer's (2012), *fraud* merupakan suatu aksi pelanggaran hukum yang hampir sama dengan tipuan, menyembunyikan, ataupun melanggar keyakinan. Menurut Karyono (2013), *fraud* merupakan penyimpangan serta perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan terencana pada tujuan tertentu seperti menipu ataupun membagikan cerminan keliru (*mislead*) terhadap pihak lain, yang dilakukan seseorang dari dalam ataupun dari luar struktur organisasi.

2.1.2.2 Jenis-jenis Fraud

Menurut organisasi *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang bergerak dalam bidang pemeriksaan atas kecurangan membagi *fraud* (kecurangan) dalam tiga tingkatan yang disebut *Fraud Tree*, yaitu sebagai berikut (Albrech, 2009) :

a. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation atau penyimpangan atas aset adalah kegiatan yang meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset dan harta perusahaan maupun pihak terkait. Penyimpangan atas aset ini adalah suatu bentuk kecurangan yang sangat mudah terdeteksi, hal ini karena sifatnya yang dapat diukur ataupun dihitung.

b. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)

Jenis *Fraud* ini adalah merupakan jenis kecurangan yang meliputi tindakan pejabat atau eksekutif perusahaan dan instansi pemerintah yang berguna

untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Kondisi keuangan yang sebenarnya direkayasa agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dinilai baik di mata publik maupun pemangku kepentingan lainnya.

c. Korupsi (*corruption*)

Jenis *fraud* korupsi adalah jenis kecurangan yang paling banyak di temui di Indonesia. Korupsi sangat susah di deteksi karena dalam tindakan korupsi melibatkan banyak pihak lain. Salah satu jenis korupsi yang paling banyak ditemukan pada negara-negara berkembang adalah kasus suap. Hal tersebut dikarenakan masih lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran, integritas dan tata kelola. Adapula tindakan-tindakan yang masih termasuk dalam korupsi, yaitu, suap, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan pemerasan ekonomi.

Teori *Fraud Diamond* merupakan suatu pandangan baru dari fenomena *fraud* yang diusulkan oleh Wolfe & Hermanson (2004). Teori ini adalah bentuk pembaruan dari Teori *Fraud Triangle* oleh Cressey (1950). Pada teori *Fraud triangle* menjelaskan bahwa terdapat tiga elemen yaitu *Pressure* (Tekanan), *Opportunity* (peluang), dan *Rasionalization* (rasionalisasi), namun pada Teori *Fraud Diamond* ini menambahkan satu elemen tambahan yaitu *Capacity* (Kemampuan).

1. *Pressure* (Tekanan)

Dorongan seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan yang dilatarbelakangi oleh tekanan biasanya dikarenakan tuntutan, gaya hidup, kebutuhan dan hal lain-lain termasuk didalamnya adalah faktor keuangan dan non keuangan. Pada hal ini, ada empat kondisi yang dapat menyebabkan tekanan pada tindak kecurangan, yaitu, kebutuhan finansial, target finansial, tekanan dari eksternal dan kestabilan finansial.

2. *Opportunity* (kesempatan)

Kesempatan terjadi apabila adanya situasi yang membuka kesempatan tersebut untuk terjadi kecurangan. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh

kurangnya tingkat pengendalian internal serta lemahnya pengawasan yang dilakukan perusahaan. Kesempatan dapat di minimalisir dengan menerapkan prosedur dan proses pada perusahaan yang baik

3. *Rationalization* (rasionalisasi),

Rasionalisasi adalah merupakan suatu sikap, karakter ataupun nilai etis yang membuat seseorang merasa benar melakukan kecurangan. Faktor rasionalisasi juga dapat dipengaruhi karena adanya tekanan pada lingkungan maupun kondisi. Hal yang paling sering ditemukan terkait faktor ini adalah “meminjam asset yang dicuri dengan tujuan membahagiakan orang yang dicintainya”

4. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan merupakan kelebihan seseorang dimana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi.

2.1.3. Faktor-Faktor Yang Dapat Mencegah *Fraud*

2.1.3.1. Pengendalian Internal

Menurut Hery (2013) Dalam pengendalian internal terdapat 4 struktur organisasi yang di cakup olehnya, yaitu, metode dan ukuran yang dikordinasi bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian serta keandalan data pada bidang akuntansi, mendorong terciptanya efisiensi dan dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manajemen. Selain itu fungsi pengendalian internal juga harus memberikan keyakinan serta kepastian atas :

1. Transaksi yang dicatat adalah benar dan ada eksistensi. Tidak dapat menyajikan atau memberikan transaksi yang fiktif dan yang sebenarnya tidak ada pada catatan akuntansi.
2. Seluruh transaksi yang ada atau terjadi, harus dicatat. Perusahaan harus memiliki prosedur untuk memiliki pengendalian dari pencegahan penghilangan transaksi.
3. Setiap transaksi yang sudah dicatat harus disajikan sesuai dengan nilai

aslinya. Hal ini dilakukan demi menjaganya ke akuratan informasi pada setiap transaksi akuntansi.

4. Transaksi harus diklasifikasikan pada perkiraan yang sesuai. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat mengklasifikasikan yang sesuai dengan perkiraan didalam jurnal laporan keuangan agar dapat dinyatakan dengan wajar.
5. Seluruh transaksi harus dicatat pada waktunya. Hal ini bertujuan agar mencegah adanya keterlambatan pencatatan yang dapat mengakibatkan perbedaan nilai antara yang dicatat dengan nilai yang sebenarnya dan dapat mengakibatkan terjadinya laporan keuangan yang terdapat unsur salah saji.

Pengendalian internal adalah merupakan suatu susunan yang terstruktur mengenai pengawasan kegiatan dan perencanaan sebuah entitas yang berfungsi untuk mengawasi dan menyusun strategi dalam mengukur apakah perusahaan sudah melakukan kegiatannya dalam ketentuan yang berlaku. (Mulyadi, 2013). Sedangkan menurut (Valery, 2014), pengendalian internal adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumberdaya suatu organisasi. Pengendalian internal memiliki peran penting untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* dan berfungsi untuk melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merk dagang).

Berdasarkan banyaknya pengertian yang terdapat diatas, bahwa dapat diambil sebuah kesimpulan seberapa penting dan berpengaruhnya pengendalian internal dalam melindungi asset perusahaan dan dalam upaya mendeteksi agar dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Dalam memiliki pengendalian internal yang baik dapat memberikan kesempatan bagi manajemen agar siap dalam menghadapi perubahan pada ekonomi yang sangat cepat, persaingan serta pergeseran persaingan konsumen, *Fraud*, dan restrukturisasi untuk progress positif di masa yang akan datang (Ruslan, 2012). Kuat serta lemahnya sistem pengendalian internal pada perusahaan dapat dijadikan sebuah tolak ukur besar atau kecilnya kemungkinan pada terjadinya error dan *fraud*, jika pengendalian internal perusahaan kuat kemungkinan terjadinya *fraud* dan kesalahan dapat diminimalisir, namun jika

pengendalian internal lemah kemungkinan terjadinya *fraud* dan kesalahan sangat besar, serta menjadi pendeteksi dini terhadap *fraud* dan segera dapat dilakukan pencegahan secepat mungkin. (Hiro, 2014) mengungkapkan bahwa sebagai instansi penyedia jasa keuangan dimana akan sangat rapuh pada terjadinya *fraud* atau kecurangan, sehingga diperlukannya pemahaman yang mendalam mengenai pengendalian internal bagi manajemen dan seluruh karyawan. Seluruh kegiatan karyawan pada organisasi yang dilakukan oleh pihak dewan atau setingkatnya pada perusahaan atau organisasi dengan tujuan pihak dewan atau komisaris dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dapat merepresentatifkan pengendalian internal.

2.1.3.2. Good Corporate Governance

Menurut (Anugerah, 2014) *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola perusahaan yang baik, setiap bisnis yang dijalankan tentu ingin memiliki tata kelola yang baik agar dapat terhindar dari praktik kecurangan. *Good Corporate Governance* sangat penting dilakukan agar tujuan dari perusahaan dapat terstruktur dengan nilai-nilai perusahaan yang berlandaskan moral, etika, dan budaya. Tunggal (2013) mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mengelola, mengawasi dan mengatur pada proses pengendalian kegiatan usaha yang memiliki tujuan untuk menaikkan harga atau nilai saham perusahaan, sekaligus berfungsi sebagai sikap atau bentuk perhatian perusahaan kepada karyawan, masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan atau para pemilik saham dan modal. Sedangkan Agoes (2012) menyampaikan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem yang berkaitan dengan hubungan antara peran jajaran komisaris peran dari direksi, *stakeholders*, dan investor. Proses yang transparan kerap dikaitkan dengan tata kelola perusahaan yang baik yang berfungsi untuk menentukan tujuan serta arah perusahaan, target dan penilaian kinerjanya.

Menurut Kusmastuti (2013), *Good Corporate Governance* merupakan sistem tentang tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua

faktor yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan regulator atau aturan-aturan perusahaan yang akan diterapkan. Sutedi (2015) menyampaikan, bahwa *Good Corporate Governance* adalah sebuah proses dan sebuah struktur yang dapat digunakan oleh pihak internal perusahaan (komisarsi, direksi, dewan pengawas atau *board of director, investor dan stakeholder* lainnya) untuk terus meningkatkan kemajuan usaha dan akuntabilitas pada perusahaan berguna untuk mewujudkan nilai para pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam waktu yang lama dengan tetap memberikan perhatian pada kepentingan *stakeholder* lainnya, yang berlandaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku.

2.2. Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Variabel/Judul	Hasil Penelitian
1.	(Jannah, 2016)	<p>Variabel Independen:</p> <p>1. <i>Good Corporate Governance</i></p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Pencegahan <i>Fraud</i></p>	<p>1. Penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya.</p>
2.	(Soleman, 2013)	<p>Variabel Independen:</p> <p>1. Pengendalian Internal</p> <p>2. <i>Good Corporate Governance</i></p>	<p>1. Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap <i>Good corporate governance</i></p> <p>2. <i>Good corporate governance</i> berpengaruh positif</p>

		<p>Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i></p>	<p>terhadap Pencegahan <i>Fraud</i></p> <p>3.Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan <i>Fraud</i></p>
3.	(Nisak, Prasetyono, & Kurniawan, 2013)	<p>Variabel Independen :</p> <p>1. Pengendalian Internal</p> <p>Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i></p>	<p>1.Lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, Aktivitas pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>, baik secara simultan maupun secara parsial.</p>
4.	(Suginam, 2017)	<p>Variabel Independen : 1.Internal Audit</p> <p>3. Pengendalian Internal</p> <p>4.</p> <p>Variabel Dependen : Pencegahan <i>Fraud</i></p>	<p>1.Audit internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>Fraud</i></p> <p>2.Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>, namun tidak signifikan.</p>

5.	(Saputra, 2017)	<p>Variabel Independen :</p> <p>1. System Internal kontrol</p> <p>2. Audit Internal</p> <p>3. Good Corporate Governance</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p><i>Fraud</i></p>	<p>1.Sistem internal control berpengaruh negative signifikan terhadap <i>Fraud</i></p> <p>2.Audit internal berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fraud</i></p> <p>3. <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fraud</i></p>
6.	(Anugerah, 2014)	<p>Variabel Independen :</p> <p><i>Good Corporate Governance</i></p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Pencegahan <i>Fraud</i></p>	<p>1. <i>Good Corporate Governance</i> sebagai media Pencegahan <i>Fraud</i>, dengan menjalankan dan memahami struktur, mekanisme, prinsip, dan fungsi <i>corporate governance</i>.</p>
7.	Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Dian	<p>Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa.</p>	<p>Akuntabilitas dan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>Fraud</i>.</p>

	Pradnyanita sari dan Ni Made Intan Priandai (2019)		
8.	Rahimah, Murni dan Lysandra (2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan <i>Fraud</i> pengelolaan dana desa.
9.	Laksmi dan Sujana (2019)	Pengaruh Kompetensi Sdm, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> , Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>Fraud</i> .
10.	Atmadja (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan <i>Fraud</i>
11.	Dwi Nur Huljanah (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>Fraud</i> .

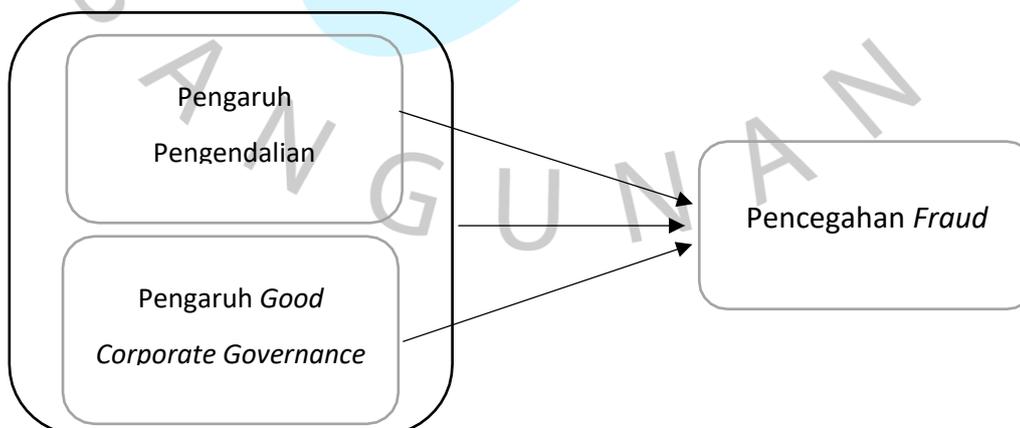
		Pengelolaan Keuangan Desa	
12.	Sari, Yuniarta & Adiputra (2015)	Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi <i>Good Governance</i> terhadap Kecenderungan <i>Fraud</i> (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Tabanan)	Efektifitas sistem pengendalian internal, Ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, dan implementasi <i>good governance</i> berpengaruh simultan <i>negative</i> terhadap kecenderungan <i>fraud</i>
13.	Triasmara dan Yane (2015)	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, TBK	Efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, baik secara bersama-sama maupun secara parsial.
14.	Glifandi (2011)	Analisis Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Keefektifan pengendalian internal dan moralitas manajemen berpengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi Faktor persepsi

			kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi.
15.	Delfi, Anugerah, Azhar, dan Desmiyawati (2014)	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Survey pada perusahaan BUMN Cabang Pekanbaru)	Efektivitas pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.3. Perbedaan Dengan Penelitian Saat Ini

Perbedaan dalam penelitian ini ada pada sampel yang digunakan, dimana sampel dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur.

2.4. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Pengendalian internal merupakan kebijakan yang perlu diterapkan didalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk melindungi seluruh asset perusahaan tersebut sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Fuad (2015) menyampaikan bahwa terdapat tiga hal yang dapat dijadikan latar belakang individu untuk melakukan perilaku kecurangan (*fraud*) atau yang dikenal pada masyarakat dengan istilah *fraud triangle*. Pada *fraud triangle* terdapat 3 hal penting, yaitu kesempatan (*opportunity*), tekanan (*pressure*) dan sikap membenaran atas perilaku maupun tindakan yang dilakukan (*rationalization*). Perusahaan yang mengalami *fraud* memungkinkan seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang di ajukan sebagai berikut :

H1 : Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*

2.5.2. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Good Corporate Governance adalah merupakan sebuah tata kelola pada perusahaan yang baik dengan tujuan agar setiap perusahaan dapat terstruktur serta terhindar dari adanya kecurangan. Dilansir soocadesign.com (2015), apabila *Good Corporate Governance* dijalankan secara optimal dapat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, keseimbangan kerangka kerja serta pemahaman menyeluruh dari pihak manajemen perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* yang berkelanjutan juga dapat mengarahkan perusahaan dalam memitigasi risiko, menjaga standar kualitas produk, dan meningkatkan akses investasi dan pendanaan.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang di ajukan sebagai berikut :

H2 : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*

2.5.3. Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Pengendalian internal sangat penting bagi perusahaan, dengan pengendalian yang baik maka sangat sulit bagi pihak-pihak lain untuk dapat melakukan suatu tindakan *Fraud*. *Good Corporate Governance* adalah merupakan suatu tata Kelola perusahaan yang baik yang perlu diterapkan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya agar terhindar dari praktik kecurangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukadwilinda, Ratnawati, (2014) yang menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini sejalan dengan penelitian Rusman Soleman (2013) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengeleminasi faktor-faktor pendorong terjadinya kecurangan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, kewajaran, integritas dan partisipasi.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang di ajukan sebagai berikut :

H3: Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* secara bersamaan atau simultan.